

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
RINGKASAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRACT	x
INTISARI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Keaslian Penelitian.....	15
E. Kegunaan Penelitian.....	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Landasan Teori.....	34
1. Teori Keadilan.....	34
2. Teori Peranan Negara.....	45
B. Konsep Dasar Hukum Persaingan Usaha.....	53
1. Asas dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha Indonesia.....	54
2. Pasar dalam Bingkai Persaingan Usaha.....	64
3. Pengecualian Monopoli BUMN Berdasarkan Pasal 51 UU-LPMPUTS	73
C. Tinjauan Umum Tentang Demonopolisasi BUMN.....	82

1. Perspektif Hukum Perdata dalam Pendirian BUMN Persero.....	84
2. PT. KAI (Persero) dan PT. Pelindo (Persero) dalam Bingkai BUMN..	94
3. Tinjauan Umum Tentang Demonopolisasi PT.KAI (Persero) dan PT.Pelindo (Persero).....	115
BAB III METODE PENELITIAN.....	128
A. Bahan/Materi Penelitian.....	129
B. Data Penelitian.....	136
C. Alat Pengumpulan Data.....	143
D. Cara Pengumpulan Data.....	145
E. Kendala.....	148
F. Analisis Data.....	149
G. Pengambilan Kesimpulan.....	152
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	154
A. Alasan Diberlakukan Demonopolisasi PT.KAI (Persero) dan PT.Pelindo (Persero) Dalam Persaingan Usaha Penyelenggaraan Jasa Perkeretaapian dan Jasa Kepelabuhanan.....	154
1. Tuntutan Globalisasi Ekonomi yang Menghendaki Persaingan Usaha Terbuka Tanpa Hambatan Batas Wilayah.....	155
2. Kebutuhan Akan Konektivitas Antar Wilayah Di Indonesia.....	161
3. Kemampuan Anggaran Negara yang Terbatas dalam Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian dan Kepelabuhanan.....	176
4. Menghadirkan Pesaing Bagi BUMN.....	179
5. Pemisahan Peran Negara dalam Kegiatan Pemerintahan dan Kegiatan Pengusahaan.....	190
B. Dampak Demonopolisasi Bagi PT.KAI (Persero) dan PT. Pelindo (Persero) dalam Persaingan Usaha Penyelenggaraan Jasa Perkeretaapian dan Jasa Kepelabuhanan	202

1.	Dampak Demonopolisasi Bagi Kedudukan PT.KAI (Persero)	
	Berdasarkan Undang-undang Perkeretaapian.....	206
1.1	Kondisi Persaingan Usaha Jasa Perkeretaapian Pasca	
	Demonopolisasi PT.KAI (Persero).....	208
1.2	Dampak Positif Demonopolisasi Bagi PT.KAI (Persero) dalam	
	Persaingan Usaha Penyelenggaraan Jasa Perkeretaapian.....	223
1.2.1	Mekanisme penyelenggaraan jasa perkeretaapian yang lebih	
	terarah karena memisahkan peran pemerintah sebagai otoritas	
	dan Badan Usaha Perkeretaapian.....	223
1.2.2	Berkesempatan untuk membangun korporasi yang mandiri	
	dan menentukan sendiri kebijakan perusahaan.....	228
1.2.3	Mendapat keistimewaan dalam hal penerapan hak konsesi	
	perkeretaapian yang tidak berlaku mundur.....	235
1.3	Dampak Negatif Demonopolisasi Bagi PT.KAI (Persero) dalam	
	Persaingan Usaha Penyelenggaraan Jasa Perkeretaapian.....	240
1.3.1	Pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang	
	diterapkan secara berbeda antara BUMN dan BUMS.....	241
1.3.2	Rentan Atas Tuntutan Pelanggaran Terhadap Aturan Hukum	
	Persaingan Usaha Sehat.....	243
2.	Dampak Demonopolisasi Bagi Kedudukan PT. Pelindo (Persero)	
	Berdasarkan Undang-undang Pelayaran.....	246
2.1	Kondisi Persaingan Usaha Jasa Kepelabuhanan Pasca	
	Demonopolisasi PT.Pelindo (Persero).....	248
2.2	Dampak Positif Demonopolisasi Bagi PT.Pelindo (Persero) dalam	
	Persaingan Usaha Penyelenggaraan Jasa Kepelabuhanan.....	263
2.2.1	Mekanisme penyelenggaraan jasa kepelabuhanan yang lebih	
	jelas dengan memisahkan peran pemerintah sebagai badan	
	otoritas dan badan usaha kepelabuhanan.....	264
2.2.2	Berkesempatan untuk membangun korporat yang mandiri	
	dan menentukan sendiri kebijakan perusahaan.....	269

2.2.3 Mendapat Keistimewaan Dalam Hal Penerapan Konsesi Pelabuhan Karena Ketentuan Mengenai Konsesi Yang Tidak Berlaku Mundur.....	277
2.3 Dampak Negatif Demonopolisasi Bagi PT.Pelindo (Persero) dalam Persaingan Usaha Penyelenggaraan Jasa Kepelabuhanan.....	283
2.3.1 Pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang diterapkan secara berbeda antara BUMN dan Perusahaan Swasta.....	284
2.3.2 Rentan Atas Tuntutan Pelanggaran Aturan Persaingan Usaha Sehat.....	287
C. Landasan Yuridis Persaingan Usaha yang Dapat Meminimalisir Dampak Negatif Demonopolisasi PT.KAI (Persero) dan PT.Pelindo (Persero) dalam Pengusahaan Jasa Perkeretaapian dan Kepelabuhanan	296
1. Demonopolisasi BUMN Perkeretaapian Malaysia dan Jepang.....	298
1.1 Demonopolisasi BUMN Perkeretaapian Malaysia.....	298
1.2 Demonopolisasi BUMN Perkeretaapian Jepang.....	305
2. Demonopolisasi BUMN Operator Pelabuhan Malaysia dan Jepang.....	312
2.1 Demonopolisasi BUMN Operator Pelabuhan Malaysia.....	312
2.2 Demonopolisasi BUMN Operator Pelabuhan Jepang.....	319
3. Penguatan Konsep Pengaturan Persaingan Usaha dalam Meminimalisir Dampak Negatif Demonopolisasi Bagi PT.KAI (Persero) dan PT.Pelindo (Persero).....	330
3.1 Konsep Normatif Pengaturan Demonopolisasi Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	338
3.2 Konsep Normatif Pengaturan Demonopolisasi Dalam Kebijakan Sektoral Bagi PT.KAI (Persero) dan PT.Pelindo (Persero).....	346

BAB V PENUTUP	364
A. Kesimpulan	364
B. Saran.....	367
DAFTAR PUSTAKA	370
GLOSARY	397